

Implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) di Desa Mengwi Kabupaten Badung

Oleh :

**Ni Luh Made Cencen Tunjung Sari¹, Ni Putu Tirka Widanti², Ida Ayu Putu Sri
Widnyani³,**

**Email : cencentunjung96@gmail.com, tirka.widanti@unr.ac.id,
dayusriwid@unr.ac.id**

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada adanya senjangan penelitian terdahulu (*research gap*) dan perbedaan fokus mengenai Implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) Pada Pengurangan Sampah Plastik di Desa Mengwi Kabupaten Badung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan berupa pengurangan sampah plastik di Kabupaten Badung. Penelitian ini dilakukan di Desa Mengwi Kabupaten Badung dengan jumlah informan yang meliputi 3 unsur seperti penanggungjawab kebijakan, pelaksana kebijakan. Seluruh data yang diperoleh dari distribusi wawancara layak digunakan dan selanjutnya melakukan tahap penarikan kesimpulan untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dan hasil kebijakan program dengan menggunakan indikator partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, tetapi implementasi program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) pada pengurangan penggunaan kantong plastik masih sulit dilakukan pada pasar tradisional dan pelaksanaan bank sampah mandiri masyarakat desa adat yang kurang berkembang karena kepentingan upacara adat dan kesibukan masyarakat desa adat yang berbeda di setiap banjar. Implementasi dalam pengurangan penggunaan kantong plastik program BATIK di lingkungan banjar Desa Mengwi berjalan sesuai dengan peraturan karena masyarakat desa adat Mengwi mengikuti semua peraturan dan himbauan dari Pemerintah kabupaten Badung.

Kata Kunci: Badung Anti Kantong Plastik, Desa Mengwi, Kabupaten Badung

ABSTRACT

This research is based on the existence of a research gap and differences in focus regarding the implementation of the Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) Program in reducing plastic waste in Mengwi Village, Badung Regency. Additionally, the study aims to address the issue of plastic waste reduction in Badung Regency. The research was conducted in Mengwi Village with informants comprising three elements: policy makers, policy implementers, and the community. All data obtained from interviews were deemed valid and subsequently used in the conclusion-drawing process to identify or understand meanings, patterns, explanatory structures, causal relationships, or propositions. The findings reveal that the implementation and outcomes of the program, evaluated using indicators of community participation, show that reducing the use of plastic bags under the BATIK program remains challenging in traditional markets. Similarly, the implementation of community-based independent waste banks in customary villages has not developed optimally due to differing ceremonial needs and the varying levels of community activity across banjars (village clusters). However, the implementation of the BATIK program to reduce plastic bag usage in the banjars of Mengwi Village complies with regulations, as the Mengwi customary village community adheres to all rules and recommendations from the Badung Regency Government.

Keywords: *Badung Anti Kantong Plastik, Mengwi Village, Badung Regency*

Institusi (Universitas Ngurah Rai¹)

Institusi (Universitas Ngurah Rai²)

Institusi (Universitas Ngurah Rai³)

1. Pendahuluan

Bali merupakan sebuah pulau kecil yang berada di sebelah Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Lombok. Pulau ini terdiri dari beberapa pulau, yakni Pulau Bali, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Luas wilayah Pulau Bali secara keseluruhan adalah 5.632,86 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 3,7–4 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023).

Pulau Bali berada di kawasan perairan Indonesia yang sangat besar, sehingga memberikan dampak signifikan bagi sektor pariwisata nasional. Daya tarik Pulau Bali yang membedakannya dari wilayah lain di Indonesia terletak pada keindahan alam,

adat istiadat, budaya, kesenian, serta beragam kuliner khas Bali. Beragam destinasi pariwisata yang dimiliki oleh Pulau Bali meliputi pantai, sawah, kawasan hutan, danau, gunung, air terjun, dan wisata buatan dengan arsitektur seni ukir khas Bali.

Pulau Bali terbagi menjadi sembilan kabupaten/kota, yaitu Jembrana, Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng. Setiap kabupaten memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan letak geografisnya. Kabupaten Gianyar, Denpasar, dan Badung merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung sektor pariwisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun internasional. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, seperti tersedianya akomodasi, tempat rekreasi, dan rumah makan yang saling berdekatan serta memiliki ciri khas masing-masing. Faktor keindahan, kesehatan lingkungan, dan ketenagakerjaan yang memadai di Kabupaten Badung menjadi transfer dasar bagi pertumbuhan ekonomi berbasis industri pariwisata, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Putra & Gunawan, 2021).

Industri pariwisata merupakan integrasi dari berbagai sektor usaha dalam menghasilkan produk maupun jasa yang dibutuhkan wisatawan. Pemerintah berperan sebagai perumus kebijakan dari atas ke bawah (top-down), masyarakat sebagai pelaksana dan pendukung, serta pelaku usaha sebagai penyedia layanan dan kebutuhan wisatawan. Ketiga elemen ini (pemerintah, masyarakat, pelaku usaha) menjadi *stakeholders* utama dalam pengembangan pariwisata. Namun demikian, meningkatnya aktivitas usaha seperti hotel, villa, restoran, bar, pasar, dan tempat hiburan turut berkontribusi terhadap peningkatan volume sampah di Bali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik (yang mudah terurai seperti daun dan sisa makanan) dan sampah anorganik (yang sulit terurai seperti

plastik dan karet). Peningkatan konsumsi masyarakat, ditambah kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, menyebabkan peningkatan volume sampah secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan solusi berkelanjutan dalam menangani masalah sampah, khususnya plastik.

Upaya pengurangan sampah plastik bertujuan menjaga kelestarian lingkungan. Hal sederhana seperti membawa kantong belanja (*tote bag*), menjadi bentuk kesadaran individu terhadap lingkungan. Sampah plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai, sehingga pengurangan penggunaannya menjadi krusial.

Pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah melalui prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Selain itu, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 juga diterbitkan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua regulasi ini menjadi payung hukum yang memperkuat langkah konkret pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Program *Badung Anti Kantong Plastik* (BATIK) merupakan turunan dari program *Gojek Sampah Plastik* (GOTIK) yang telah lebih dulu dilaksanakan. Program GOTIK diluncurkan pada tahun 2016 dengan konsep menjemput dan membeli sampah plastik dari masyarakat dengan harga Rp500/kg. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah melalui Dinas Kebersihan juga menyediakan hotline SMS dan layanan media sosial untuk menerima laporan atau permintaan penjemputan sampah.

Program BATIK memperluas cakupan pengelolaan sampah plastik berbasis partisipasi publik dan menekankan edukasi masyarakat untuk membawa *tote bag* saat berbelanja, serta tidak menggunakan kantong plastik, sedotan plastik, dan *styrofoam* di restoran, pasar, sekolah, hingga bandara. Inisiatif ini juga selaras dengan konsep *Tri Hita Karana*, yakni harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan.

Implementasi program BATIK menjadi aspek penting dalam manajemen kebijakan publik. Untuk mengukur keberhasilan implementasinya, dapat digunakan

teori POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Pemerintah perlu merancang rencana strategis (*Planning*), menetapkan pembagian tugas melalui regulasi yang jelas (*Organizing*), mendorong sinergi antar pelaku (*Actuating*), dan melakukan pengawasan menyeluruh (*Controlling*).

Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas program BATIK sangat ditentukan oleh faktor internal (kesadaran dan pengalaman individu) serta faktor eksternal (lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi). Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan bersih dan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Badung.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas mengenai identifikasi masalah di daerah yang akan dilakukan penelitian, sehingga dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut : Mengapa Implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) Pada Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung desa Mengwi ?, Faktor apa yang menyebabkan konsep implementasi kebijakan melalui program di Kabupaten Badung desa Mengwi memberikan dampak untuk mengurangi sampah plastik ?, Apa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola sampah plastik secara mandiri?

2. Kajian Pustaka

Secara umum, program merupakan penjabaran dari suatu rencana. Dalam konteks ini, program adalah bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan sebagai kerangka dasar pelaksanaan suatu kegiatan. Vikalista (2018) menyatakan bahwa program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. Lebih lanjut, Vikalista (2018) menjelaskan bahwa penyusunan program merupakan penjabaran dari suatu rencana yang telah ditetapkan agar memiliki ciri-ciri operasional tertentu.

Melalui program, segala bentuk rencana menjadi lebih terorganisir dan mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Korten (dalam Jones, 1996:232), yang menyatakan bahwa *"A programme is a collection of interrelated*

projects designed to harmonize and integrate various actions and activities for achieving overall policy objectives." Dengan kata lain, program adalah kumpulan proyek-proyek yang saling berkaitan dan dirancang untuk melaksanakan kegiatan yang harmonis serta terintegrasi guna mencapai tujuan kebijakan secara menyeluruh.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa program adalah tindakan yang didasarkan pada model teoritis yang jelas. Sebelum merumuskan solusi dan memulai intervensi terhadap suatu masalah sosial, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap penyebab dan dinamika permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dalam merancang suatu program, diperlukan formulasi yang matang dan sesuai dengan kebutuhan, serta partisipasi aktif dari pelaksana program.

Kebijakan selalu berkaitan dengan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dapat diartikan sebagai aksi umum atau kerangka arah dari suatu program untuk mencapai tujuan spesifik. Tujuan tersebut telah dirumuskan sebelumnya secara rinci dan dicapai melalui pelaksanaan program atau proyek tertentu. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana alam seperti letusan gunung berapi, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan manajemen bencana, yang kemudian dijabarkan ke dalam program mitigasi, dan dipecah lagi ke dalam proyek-proyek spesifik seperti sosialisasi, simulasi, pemetaan, dan pelatihan masyarakat.

Proyek memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan program dan biasanya bersifat sementara, dengan sasaran, lokasi, dan alokasi anggaran yang jelas. Proyek menjabarkan program secara lebih teknis dan terukur. Sementara itu, kebijakan memiliki cakupan yang lebih luas, dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan, dan mencakup sejumlah program dan proyek di dalamnya.

Program *Badung Anti Kantong Plastik* (BATIK) merupakan kelanjutan dari program *Gojek Sampah Plastik* (GOTIK) yang telah dijalankan antara tahun 2016 hingga 2018. GOTIK menjadi salah satu program unggulan dalam penanganan sampah di Kabupaten Badung dan dirancang sebagai respons atas peningkatan volume sampah, khususnya plastik, di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Badung melalui

kebijakan ini ingin menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mendukung citra Bali sebagai destinasi wisata yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan erat kaitannya dengan dorongan normatif dan regulasi. Sementara itu, program membutuhkan dorongan, aturan, serta implementasi terstruktur. Proyek, di sisi lain, berfokus pada pelaksanaan teknis dari program. Dengan demikian, hubungan antara ketiganya dapat dijelaskan sebagai satu kesatuan yang saling terkait: kebijakan melahirkan program, dan program dijalankan melalui proyek-proyek teknis.

Meningkatnya volume sampah setiap tahunnya menjadikan isu ini sebagai persoalan prioritas yang perlu diatasi secara komprehensif, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, di antaranya pengalokasian anggaran operasional, penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah, serta pembangunan dan pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, tantangan masih cukup besar, karena kapasitas TPA terbatas dan memerlukan lahan yang luas serta teknologi pengolahan yang mahal untuk menjaga perlindungan lingkungan.

Permasalahan sampah tidak dapat dibebankan semata-mata kepada pemerintah. Seluruh lapisan masyarakat perlu turut bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Sejumlah inisiatif telah muncul dari tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap isu lingkungan. Salah satu bentuk implementasi pengelolaan sampah yang relevan adalah dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018.

Di Kabupaten Badung, prinsip 3R diterapkan melalui pendekatan pengurangan penggunaan sampah plastik. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan membawa tas belanja sendiri (*tote bag*). Selain itu, seluruh restoran, pusat perbelanjaan modern maupun tradisional, diarahkan untuk tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai. Kesadaran ini tumbuh sebagai bagian dari program BATIK yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama pengelolaan sampah. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat, untuk masyarakat, sehingga hasil dan manfaatnya bersifat langsung dan berkelanjutan.

Implementasi program BATIK dapat menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam program dan proyek yang aplikatif. Hal ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya terletak pada regulasi semata, tetapi juga pada bagaimana program tersebut dijalankan melalui mekanisme yang kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

3. Metode

Kabupaten Badung dipilih sebagai lokasi penelitian karena hingga saat ini belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai implementasi Program *Badung Anti Kantong Plastik* (BATIK). Program ini merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh Bupati Badung dalam rangka mengurangi penggunaan sampah plastik guna menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini difokuskan pada wilayah padat penduduk dan kawasan pariwisata, khususnya di Kabupaten Badung, dengan studi kasus pada kegiatan pemilahan dan penyetoran sampah yang dilakukan secara rutin setiap bulan ke banjar atau lingkungan RT/RW setempat.

Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Mengwi, Kabupaten Badung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada berbagai alasan. Sebelum diterapkannya program BATIK, Kabupaten Badung menghadapi berbagai persoalan lingkungan, terutama tingginya produksi sampah plastik. Hal ini disebabkan oleh kepadatan penduduk dan pesatnya pertumbuhan industri pariwisata, termasuk keberadaan hotel, restoran, pusat oleh-oleh, dan bandara. Di samping itu, tingkat kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah masih tergolong rendah, sehingga menyebabkan volume sampah meningkat dari tahun ke tahun.

Permasalahan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis melalui peluncuran Program BATIK. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan mengedukasi masyarakat agar membawa kantong belanja sendiri (*tote bag*) saat berbelanja serta menyetorkan sampah plastik setiap bulan ke banjar setempat. Setelah program ini dijalankan, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat dalam

memilah sampah organik dan anorganik serta partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam proses implementasi Program BATIK di tingkat masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci (tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup), serta dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahapan utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi Program BATIK dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat serta pengelolaan sampah plastik secara berkelanjutan di wilayah Desa Mengwi.

4. Hasil dan Pembahasan

Sampah merupakan permasalahan lingkungan yang krusial, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, termasuk di Desa Mengwi, Kabupaten Badung. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, volume sampah pun meningkat. Kenaikan ini tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan populasi, tetapi juga oleh pola hidup konsumtif masyarakat yang berdampak pada beragam jenis sampah yang dihasilkan. Kondisi ini memberi pengaruh langsung terhadap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, hingga kerugian sosial dan ekonomi akibat emisi gas beracun yang timbul dari proses pembusukan sampah.

Desa Mengwi sendiri telah merasakan dampak nyata dari persoalan sampah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang menampung sampah dari wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan telah mendekati kapasitas maksimum (*overload*), meskipun luas lahan yang digunakan mencapai 22 hektare dengan sistem *cell sanitary landfill*. Sistem ini mengelola sampah dengan cara

menumpuk di area cekung, kemudian dipadatkan dan ditimbun dengan tanah. Namun demikian, sistem tersebut belum mampu menampung volume sampah yang terus meningkat setiap tahun.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, volume sampah di Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari 210 ton per hari pada tahun 2020 menjadi 298,46 ton per hari pada tahun 2024. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk juga meningkat dari 640.000 jiwa menjadi 692.200 jiwa. Walaupun pertumbuhan volume sampah tampak tidak melonjak drastis setiap tahun, akumulasi sampah yang tidak tertangani tetap menjadi persoalan besar, terutama dengan latar belakang kabupaten yang padat pariwisata dan aktivitas ekonomi lainnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Drs. I Wayan Puja, M.Si., menyatakan bahwa sebagian besar sampah dihasilkan dari kawasan pariwisata dan desa adat. Dalam wawancara yang dilakukan pada 17 Februari 2025, beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung telah menggunakan sistem lapis urug (*sanitary landfill*), namun tetap belum mencukupi untuk menampung sampah dari seluruh wilayah. Oleh karena itu, pihaknya telah mengerahkan berbagai sarana dan prasarana, serta menyosialisasikan sejumlah program lingkungan di seluruh banjar, termasuk Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) yang mengusung konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) berbasis kearifan lokal.

Salah satu bentuk nyata pengelolaan lingkungan adalah implementasi Program BATIK dan Buku Tabungan Bank Sampah Masyarakat Kabupaten Badung. Masyarakat didorong untuk membawa tas belanja sendiri (*tote bag*) dan menyetorkan sampah plastik ke banjar secara berkala. Melalui pemberdayaan berbasis desa adat dan pararem (aturan lokal), masyarakat mulai menunjukkan perubahan perilaku yang positif dalam memilah dan mengelola sampah.

Permasalahan sampah pada dasarnya merupakan isu publik yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 yang menargetkan

pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta memperkuat pengawasan dan kerja sama antarpemangku kepentingan.

Pengelolaan sampah di Desa Mengwi juga mengikuti prinsip pengelolaan terpadu. Sampah yang berasal dari berbagai sumber, seperti tempat wisata, restoran, kafe, hotel, hingga kegiatan adat dan keagamaan, dikumpulkan dengan sarana transportasi seperti dump truck dan pick-up, lalu dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang ke TPA. Kepala Desa Mengwi, I Nyoman Suwarjana, SE., dalam wawancara tanggal 25 Februari 2025, menyatakan bahwa lokasi-lokasi padat wisata merupakan penghasil sampah terbanyak, dan pihak desa telah melakukan analisis untuk mengklasifikasikan timbulan sampah berdasarkan sumbernya.

Dalam hal sistem pengelolaan, Kabupaten Badung telah menetapkan 10 zona pelayanan persampahan berdasarkan kriteria kawasan desa adat dan pariwisata. Di samping itu, pemerintah daerah juga menyediakan tempat pengumpulan sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST 3R) yang tersebar di seluruh kecamatan. Berdasarkan data DLHK tahun 2024, Kecamatan Mengwi sendiri memiliki 7 kontainer dan 10 unit TPST 3R yang berperan penting dalam pengelolaan sampah lokal sebelum dikirim ke TPA. TPS tidak tersedia di setiap banjar, sehingga masyarakat diwajibkan memilah dan menyetorkan sampah secara langsung ke banjar setiap minggunya. Pengumpulan dilakukan setiap hari dari TPST ke TPA menggunakan kendaraan berkapasitas besar.

Selain itu, Kabupaten Badung memiliki bank sampah induk bernama *Bank Sampah Mandiri Mangu Srikandi*, yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Kebersihan dan Limbah. Bank sampah ini menjalankan pengelolaan berdasarkan prinsip 3R dan melibatkan desa adat sebagai mitra strategis. Kolaborasi ini bertujuan tidak hanya untuk menekan timbulan sampah, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Bank sampah sebagai bagian dari strategi pengurangan sampah plastik telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012. Dalam aturan tersebut ditegaskan pentingnya rekayasa sosial yang mendorong partisipasi

masyarakat secara langsung. Perubahan perilaku ini menjadi tujuan utama dari Program BATIK, yang mengintegrasikan pengurangan penggunaan kantong plastik dan optimalisasi bank sampah sebagai media edukasi dan ekonomi sirkular berbasis komunitas.

Dengan demikian, metode pengurangan penggunaan kantong plastik dan penguatan bank sampah terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Badung. Keberhasilan program sangat bergantung pada inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat serta dukungan pemerintah dan desa adat. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan serta membangun budaya bersih dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Pembahasan hasil penelitian ini menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan, yang kemudian telah dianalisis melalui proses reduksi, kategorisasi, dan penyederhanaan sesuai dengan fokus penelitian, yakni implementasi program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) di Kabupaten Badung. Program ini dianalisis berdasarkan konsep partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi program dimaknai sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak, terutama masyarakat, dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Proses implementasi ini erat kaitannya dengan evaluasi serta monitoring kebijakan, yang bertujuan untuk memahami hubungan sebab-akibat dari pelaksanaan kebijakan terhadap output dan outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, indikator implementasi yang digunakan mencakup lima komponen utama: input kebijakan, proses kegiatan, implementasi program, keluaran (*output*), dan dampak langsung (*outcome*).

Program BATIK di Desa Mengwi merupakan bentuk solusi konkret pengelolaan sampah plastik yang menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat. Salah satu inovasi dalam program ini adalah penerapan *totte bag* sebagai pengganti kantong plastik serta pengelolaan sampah melalui sistem bank sampah yang diintegrasikan dengan buku tabungan. Inovasi ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya desa adat dan kelompok PKK, dalam memilah dan menyetor sampah secara berkala.

Pendekatan ini didukung oleh DLHK Kabupaten Badung dan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 dan 48 Tahun 2018.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat seperti I Made Gede Astawa, Drs. I Wayan Puja, I Made Wija Agustana, dan Ni Kadek Sri Udayani menguatkan bahwa pengelolaan sampah berbasis komunitas telah memberikan dampak nyata. Misalnya, Bank Sampah Yoga Mesari telah menjadi wadah strategis untuk membangun kesadaran lingkungan dan memberdayakan masyarakat melalui sistem insentif berbasis sampah. Bank sampah ini tidak hanya menciptakan dampak lingkungan yang positif, tetapi juga manfaat ekonomi dengan menukar sampah menjadi saldo atau barang kebutuhan pokok.

Analisis implementasi program BATIK selanjutnya menggunakan model George C. Edward III yang terdiri dari empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi menekankan pentingnya penyampaian informasi yang tepat, konsisten, dan tidak ambigu. Dalam konteks ini, komunikasi dilakukan secara langsung melalui sosialisasi dan secara digital melalui grup WhatsApp untuk penyampaian informasi transaksi bank sampah. Hal ini sangat berperan dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaksanaan program.

Variabel sumber daya meliputi ketersediaan staf yang kompeten, informasi yang akurat, serta fasilitas yang memadai. DLHK menyediakan petugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta fasilitas pendukung seperti buku tabungan, armada pengangkut, dan lokasi bank sampah di berbagai desa di Kecamatan Mengwi. Bank Sampah Mandiri (BSM) yang dikelola masyarakat juga menunjukkan efektivitas dalam pengumpulan dan pengolahan sampah berbasis rumah tangga.

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan turut menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Para implementor tidak hanya memahami instruksi kebijakan, tetapi juga menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan di lapangan. Sikap antusias ini terlihat dari inisiatif desa adat dan keterlibatan pemuda serta tokoh

masyarakat dalam mendorong program BATIK secara berkelanjutan. Sikap ini mendukung pelaksanaan kebijakan agar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi dihayati sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.

Struktur birokrasi yang mendukung juga menjadi landasan kokoh dalam implementasi program BATIK. Koordinasi antara DLHK, pemerintah desa, dan masyarakat berjalan dengan baik. Contohnya, Kepala Desa Mengwi I Nyoman Suwarjana menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pengurangan kantong plastik dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti truk sampah, serta memantau pelaku usaha dan masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan. Struktur birokrasi yang solid memudahkan pelaksanaan kebijakan di berbagai tingkatan.

Selain aspek struktural, program BATIK juga berhasil mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam implementasinya. Hal ini tampak dari peran desa adat yang membentuk aturan lokal atau *parerem* untuk melarang penggunaan kantong plastik dan mendorong warga menggunakan *totte bag* serta memilah sampah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pelibatan sosial dan budaya lokal dapat menjadi katalisator dalam mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi program BATIK tidak hanya menurunkan volume sampah plastik di Desa Mengwi, tetapi juga membentuk ekosistem sosial yang sadar akan pentingnya pengelolaan sampah. Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) diintegrasikan dalam sistem bank sampah untuk menciptakan perilaku baru yang berkelanjutan. Program ini telah menjadikan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek perubahan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan, yang pada akhirnya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Implementasi program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) di Desa Mengwi, Kabupaten Badung telah didefinisikan dalam pembahasan sebelumnya sebagai bentuk nyata pelaksanaan kebijakan lingkungan yang

berbasis masyarakat. Program ini diharapkan mampu mengoptimalkan proses pengurangan sampah plastik, khususnya kantong plastik, melalui pendekatan partisipatif dan sistem pengelolaan yang terstruktur. Upaya *controlling* dalam implementasi program ini menunjukkan hasil yang beragam, dengan capaian yang masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek pelaksanaan di pasar tradisional serta pengembangan bank sampah mandiri di tingkat desa adat. Hambatan ini umumnya muncul akibat kepadatan aktivitas upacara adat dan perbedaan tingkat kesadaran masyarakat antarbanjar.

Berdasarkan indikator implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, ditemukan sejumlah temuan penting. Pada aspek komunikasi, sosialisasi program BATIK telah dilakukan melalui berbagai media seperti pertemuan langsung, penyebaran pamflet, serta media sosial. Namun, efektivitas komunikasi masih belum optimal karena sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dan tujuan program. Koordinasi lintas pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat juga belum sepenuhnya berjalan sinergis sehingga menghambat kesamaan persepsi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik.

Selanjutnya, dari sisi sumber daya, ketersediaan tenaga pelaksana program sudah mencukupi, namun dari segi kapasitas dan kompetensi teknis dalam pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan. Fasilitas dan pendanaan untuk mendukung penggunaan alternatif kantong plastik seperti tote bag memang tersedia, tetapi distribusinya belum merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pelosok dan banjar terpencil.

Pada aspek disposisi atau sikap pelaksana, aparatur desa menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program BATIK. Akan tetapi, motivasi masyarakat masih bervariasi. Beberapa masyarakat masih memilih menggunakan kantong plastik karena alasan kepraktisan dan harga yang lebih murah. Hal ini banyak ditemukan di pasar tradisional, khususnya pada pembelian kebutuhan harian seperti sayuran, daging, dan bumbu masak, yang secara umum masih menggunakan wadah plastik konvensional.

Sisi struktur birokrasi, mekanisme pelaksanaan program BATIK sudah memiliki garis koordinasi yang jelas antara pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta organisasi kemasyarakatan seperti desa adat dan kelompok PKK. Meski demikian, masih terdapat kebutuhan untuk menyederhanakan alur koordinasi agar proses implementasi lebih efisien dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Secara keseluruhan, implementasi Program BATIK di Desa Mengwi, Kabupaten Badung telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Meski begitu, keberhasilan pelaksanaan masih membutuhkan perbaikan dalam hal efektivitas komunikasi, penguatan kapasitas sumber daya, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penyederhanaan struktur birokrasi guna memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.

Adapun saran yang diberikan. Pertama, implementasi program BATIK di Desa Mengwi perlu dibina secara lebih intensif melalui pengawasan penggunaan tote bag, serta peningkatan kuantitas dan kualitas penyetoran sampah plastik ke bank sampah mandiri. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang hijau, bersih, dan sehat.

Kedua, aparaturnya pelaksana di tingkat desa seperti kepala lingkungan, kelurahan banjar, dan bendesa adat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program BATIK. Dengan pendekatan berbasis kearifan lokal, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan karena masyarakat akan merasa memiliki tanggung jawab bersama atas keberhasilan program.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pengelolaan sampah plastik yang lebih efisien menjadi hal mendesak. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas implementasi di lapangan, tetapi juga mampu membentuk kader lingkungan desa yang tangguh dan berkelanjutan.

Keempat, distribusi tas ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik perlu diperluas secara merata. Pemerintah daerah juga dapat menjalin kemitraan dengan UMKM lokal untuk memproduksi tas belanja berbahan alami atau daur ulang,

sehingga selain mendukung pelestarian lingkungan, langkah ini juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi lokal.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2023). *Provinsi Bali dalam Angka 2023*. BPS Provinsi Bali. Diakses pada 2 Juli 2025, dari <https://bali.bps.go.id/publication>.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Jones, C. O. (1996). *An Introduction to the Study of Public Policy* (3rd ed.). Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah*. Diakses pada 3 Juli 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/42906/permen-lh-no-13-tahun-2012>.

Korten, D. C. (1993). *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*. Kumarian Press.

Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Diakses pada 3 Juli 2025, dari <https://jdih.badungkab.go.id>.

Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Diakses pada 3 Juli 2025, dari <https://jdih.badungkab.go.id>.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Diakses pada 3 Juli 2025, dari <https://jdih.baliprov.go.id>.

Putra, A. A., & Gunawan, I. N. (2021). Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.24843/JEKP.2021.v12.i01.p05>.

Rachmadi, R. (2021). *Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah*. Yogyakarta: Deepublish.

Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Diakses pada 2 Juli 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id>.

Vikalista, F. (2018). Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 134–145. <https://doi.org/10.22219/jip.v9i2.6582>.